

**PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada SKPD Kota Pekanbaru)**

Oleh:

Berry Wan Saputra

Pembimbing : Zulbahridar dan Lila Anggraini

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : berrywansaputra10@gmail.com

*Effect of Implementation of the Government Accounting Standards, Accounting
Information Systems and Internal Control System on the Quality of Government
Finance Report*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the implementation of government accounting standards, accounting information systems and internal control systems of the quality of local government financial reports on the regional work units Pekanbaru. The dependent variable used in this study was the quality of local government financial reports. Independent variables used adalah implementasi government accounting standards, the implementation of information systems akuntansidan implementation of the internal control system. The sample in this research is the head of the financial section and sub regional work units numbered 52 people. Sampling method used in this research is census method. Data collection techniques in this study are primary data, while data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS version 21 for Windows. Results from this study showed that: (1) there are significant implementation of government accounting standards and the implementation of the internal control system of the quality of local government financial reports Pekanbaru, (2) there is no effect of accounting information systems implementation to the quality of local government financial reports Pekanbaru.

Keywords: accounting standards, information, control, quality, and financial reports

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah,

memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur pemerintahannya dan mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk dapat dioptimalkan dengan maksimal agar mampu memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dengan adanya Undang-

Undang tersebut, setiap daerah dipacu untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahannya dapat ditopang dengan dua pilar utama yaitu transparan dan akuntabel.

UU No 17 tahun 2003 mengisyaratkan bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah atau laporan keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK di maksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (Opini) sebagaimana diamanatkan oleh UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam hal ini BPK memberikan 4 macam opini yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kembali memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2013. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kota Pekanbaru pada tahun – tahun sebelumnya. Opini WDP yang diberikan oleh BPK tersebut diberikan untuk dampak sebagai berikut, (1) Piutang Retribusi. Penyajian Piutang Retribusi dalam Neraca per 31 Desember 2013, diantaranya merupakan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB). Sebagian nilai Piutang Retribusi IMB tersebut tidak didasarkan kepada pengawasan/pemeriksaan fisik, tidak didukung dengan bukti yang memadai dalam perhitungan dan penetapan.

Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2013 tersebut; (2) Investasi Permanen. Penyajian Investasi Permanen dalam Neraca per 31 Desember 2013 merupakan penyertaan modal pada enam BUMD yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah; (3) Aset Tetap. Penyajian sebagian nilai Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2013 tidak didukung dengan dokumen sumber yang memadai tentang rincian aset tetap berdasarkan klasifikasi dan nilai perolehan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai Aset Tetap per 31 Desember tersebut. Permasalahan tersebut telah menjadi pengecualian pada opini BPK atas LKPD Kota Pekanbaru TA 2009, 2010, 2011, dan 2012, namun Pemerintah Kota Pekanbaru tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Selain hal – hal tersebut diatas, pada Buku II BPK RI menemukan menyajikan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah (1) Persiapan Pemerintah Kota Pekanbaru Menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrua! Belum Memadai; (2) Penatausahaan Kas Umum Daerah Tidak Sesuai Dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Trans Metro Pekanbaru (BLUD TMP) Belum Sesuai Dengan Ketentuan; (4) dan lainnya.

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, Roesyanto (2007) menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP No.24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian dari Juwita (2010) bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian dari oleh Rajana (2009) yang menyatakan bahwa pemahaman SAP memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap keberhasilan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan pemerintah merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunaanya, untuk menghasilkan informasi yang berkualitas baik, sebuah organisasi harus mempunyai Sistem Informasi yang baik, sistem informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik seperti di Pemerintah Daerah (Laudon & Laudon, 2007). Penelitian Juwita (2010) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi sistem informasi akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Diani (2014) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Penelitian Sukmaningrum & Harto (2012) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Choirunisah (2008) yang menemukan internal kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi instansi.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Rukmi Juwita (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) objek penelitian, yaitu pada Pemerintahan Kota Pekanbaru berbeda dengan yang meneliti sebelumnya pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (2) menambah variabel sistem pengendalian internal.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) apakah implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?, (2) implementasi sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?, (3) implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ?

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) membuktikan implementasi standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) membuktikan implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas, (3) membuktikan implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TELAAH PUSTAKA

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- A. Relevan
- B. Andal
- C. Dapat dibandingkan
- D. Dapat dipahami

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010) yaitu: Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah prinsip-prinsip

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi (Bodnar dan Hopwood, 2000). Informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi dapat diterapkan secara manual maupun terkomputerisasi.

Menurut Yuliani, Nadirsyah, dan Bakar (2010) bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Unsur SPI dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 meliputi:

- A. Lingkungan Pengendalian.
- B. Penilaian Risiko.
- C. Kegiatan Pengendalian.
- D. Informasi dan Komunikasi.
- E. Pemantauan.

Menurut Mahmudi (2007) keterkaitan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya SAP. Permana (2011) tentang pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah dan implikasinya pada akuntabilitas, mendapatkan hasil, yaitu terdapat hubungan antara Standar Akuntansi Pemerintahan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas.

H1 : implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Diani, 2014) menyatakan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan tersebut, sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah dapat sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Juwita (2010) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem informasi akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.

H2 : implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal adalah proses integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal). Penerapan SPI yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*. Hasil penelitian dari Susilawati dan Riana (2013) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 74.6%.

H3 : implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Adapun pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus. Metode sensus adalah semua populasi dijadikan sampel. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan sub bagian keuangan keuangan, sehingga tiap SKPD ditetapkan sebanyak 2 orang yang menjadi responden. Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala dan sub bagian keuangan merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah

daerah. Responden dalam penelitian ini adalah 52 orang dari 26 SKPD.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan cara memberikan kuesioner kepada pegawai yang terkait dengan aparat pengelola keuangan daerah pada masing-masing SKPD kota Pekanbaru. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji normalitas analisis regresi berganda dan koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS versi 20.0.

Variabel Dan Defenisi Operasional

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang sesuai dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Dalam PP nomor 71 tahun 2010 untuk dapat memenuhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka haruslah relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Keempat dimensi diatas diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator: manfaat dari laporan keuangan yang dihasilkan, ketepatan pelaporan laporan keuangan, kelengkapan informasi yang disajikan, Penyajian secara jujur, Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, Isi laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan kejelasan penyajian informasi dalam laporan keuangan.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator yang dikembangkan dari Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, yaitu Akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Implementasi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi yang kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Sistem informasi akuntansi dapat diterapkan secara manual maupun terkomputerisasi. Menurut Selamat (2011) proses sistem informasi akuntansi terdiri dari input, pemrosesan, output, penyimpanan dan pengontrolan. Diukur dengan 6 (enam) indikator, yaitu : Efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern merupakan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Pengukuran dalam penelitian ini dikembangkan dari PP nomor 60 tahun 2008 yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka keperluan penelitian, pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pekanbaru. Dengan mengambil masing-masing 2 responden pada setiap SKPD yaitu kepala dan sub bagian keuangan SKPD.

Kuesioner yang dikirim sebanyak 52 kuesioner dan yang kembali sebanyak 44 kuesioner (84,61%). Sehingga kuesioner yang dapat digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah 44 kuesioner (84,61%).

Hasil Statistik Deskriptif

Data yang diperoleh dari kuisisioner di tabulasi untuk tujuan analisis data. Deskriptif dari statistik variabel penelitian adalah untuk menggambarkan tentang tanggapan

responden yang menunjukkan teoritis, rentang aktual, rata-rata dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Statistik disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	51.93	2.706	44
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	32.30	2.767	44
Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (X2)	42.27	3.323	44
Implementasi Sistem Pengendalian Internal (X3)	59.18	3.961	44

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Nilai rata-rata keempat variabel tersebut lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga ini menunjukkan bahwa penyebaran data sudah baik.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini pengujian validitas menggunakan nilai *Correlated Item – Total Correlation*. Nilai r hitung yang diperoleh dalam penelitian ini dibandingkan dengan nilai r tabel untuk menguji validitas data. Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. Tetapi, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item pertanyaan dalam penelitian ini tidak valid. Dalam penelitian ini diperoleh tingkat kepercayaan 95%, ($\alpha = 5\%$), *degree of freedom* (df) = $n - 2 = 44 - 2 = 42$, sehingga didapat r tabel sebesar 0,297.

Dari hasil pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 20.0 ketahui bahwa pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid. Terbukti bahwa $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga seluruh item pertanyaan dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya dalam penelitian ini.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu konstruk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu. SPSS 20 *for windows* memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau realible. Tetapi jika nilai koefisien alpha lebih kecil dari 0,60 maka instrumen dalam penelitian ini tidak handal atau reliabel.

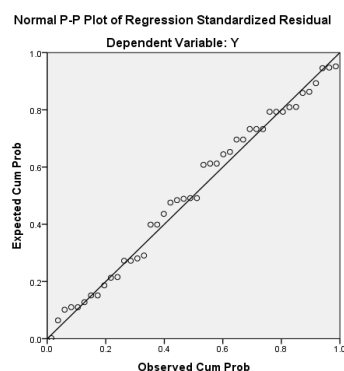
Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel yang diteliti lebih besar dari 0,60.

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan

memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas data dengan *P-P Plot* untuk variabel dependen (Y) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Normalitas
P-P Plot Regression Standardized Residual



Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Dari grafik *P-P Plot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinieritas Data

Uji ini dimaksud untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala multikolinieritas, tetapi jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$

maka tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali,2013).

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa ketiga variabel ini memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai $VIF < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas dalam penelitian ini.

Tabel 2
Nilai Tolerance dan VIF

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,501	1,996
Implementasi Sistem Informasi Akuntansi (X2)	0,839	1,192
Implementasi Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,445	2,247

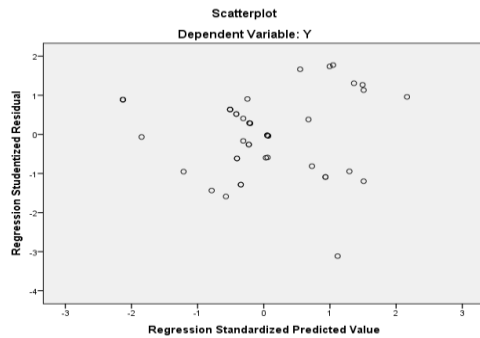
Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dari grafik *scatterplot* pada gambar 2 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 2



Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Hasil Uji Koefisien Determinasi(R^2)

Untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel Independen menggunakan koefisien determinasi dan regresi simultan. Koefisien determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R
1	.765 ^a	.585		.554

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat besar nilai R^2 sebesar 0.585 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 58,5%. Hal ini berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 58,5% sedangkan sisanya 41,5% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Regresi Simultan atau Uji-F

Uji regresi simultan atau uji-F bertujuan untuk menguji secara serempak (simultan) antara variabel keseluruhan yaitu implementasi standar akuntansi pemerintahan, implementasi sistem informasi

akuntansi dan implementasi sistem pengendalian internal memiliki peran dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4
Uji Regresi Simultan (F-test)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	184.235	3	61.412	18.815	.000 ^b
Residual	130.561	40	3.264		
Total	314.795	43			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), SAP, SIA, SPI

Sumber: data olahan SPSS 20,2015

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F pada tabel 4 terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 18,815 dan nilai signifikansi sebesar 0.000. Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama atau model regresi yang terbentuk signifikan untuk digunakan dalam analisis.

Hasil Analisis Regresi Berganda atau Uji-t

Setelah model regresi telah dinyatakan layak, maka akan dilakukan pengujian terhadap setiap masing-masing variabel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini akan menggunakan uji-t. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial.

Dari tabel dibawah terlihat bahwa nilai t hitung dari masing-masing variable implementasi standar akuntansi pemerintahan (X1), implementasi sistem informasi akuntansi (X2), implementasi sistem pengendalian internal (X3), adalah 2.701, (-0.344), dan 2.914 serta signifikansinya masing-masing 0.010, 0.906, dan 0.006 sedangkan nilai t tabel adalah sebagai berikut:

$$t_{\text{tabel}} = n-k-1 ; \alpha/2$$

$$= 44-3-1 ; 0,05/2$$

$$t_{\text{tabel}} = 40 ; 0,025 = 2,021$$

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	22.135	4.649		4.761	.000		
X1	.380	.141	.389	2.701	.010	.501	1.996
X2	-.011	.091	-.013	-.119	.906	.839	1.192
X3	.304	.104	.445	2.914	.006	.445	2.247

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Sumber: data primer, olahan SPSS 20.0, 2015

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian terhadap hipotesis pertama dilihat nilai t hitung sebesar 2,701 dan nilai t tabel adalah 2,021. Dengan demikian t hitung > t tabel, maka sesuai dengan kriteria

dapat disimpulkan variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 yang menyebutkan SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkannya standar akuntansi pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah diuraikan oleh Juwita (2010) bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta memberikan bukti empiris bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Susilawati & Riana, 2013).

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian terhadap hipotesis kedua dilihat nilai t hitung untuk pengujian ketiga yaitu sebesar $(-0,119)$ dan nilai t tabel adalah $2,021$. Dengan demikian t hitung $< t$ tabel, maka sesuai dengan kriteria dapat disimpulkan variable siste informasi akuntansintidak berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pendapat (Laudon & Laudon, 2007) yang menyatakan bahwa Laporan keuangan pemerintah merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya, untuk menghasilkan informasi yang berkualitas baik, sebuah organisasi harus mempunyai Sistem Informasi yang baik, sistem informasi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun organisasi sektor publik seperti di Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian (2014) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari data distribusi frekuensi untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dimana tingkat capaian responden rata-rata untuk variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berada pada kategori baik. Tapi pada kenyataannya pemerintah dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah belum

sepenuhnya dapat mempertinggi efektifitas, Menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan efesiensi aparatur pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. Walaupun secara persepsi SKPD telah melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun pada kenyataan yang ada bahwa SKPD belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Padahal Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah.

Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian terhadap hipotesis ketiga dilihat nilai t hitung untuk pengujian ketiga yaitu sebesar $2,914$. Nilai t tabel adalah $2,021$. Dengan demikian t hitung $> t$ tabel, maka sesuai dengan kriteria dapat disimpulkan variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2007) keterkaitan sistem pengendalian inten terhadap kualitas laporan keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam

sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Susilawati dan Riana (2013) Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74.6%. Hal ini disebabkan suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal (*internal control*).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel implementasi standar akuntansi pemerintah (X1) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan hasil t-hitung 2,701 yang lebih besar dari t-tabel 2,021.
2. Variabel implementasi sistem informasi akuntansi (X2) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini dibuktikan dengan hasil t-hitung (-0,119)

yang lebih besar dari t-tabel 2,021.

3. Variabel implementasi sistem pengendalian internal (X3) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan t-hitung 2,914 lebih kecil dari t-tabel 2,021.

Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh bahwa variabel implementasi standar akuntansi pemerintahan dan implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan implementasi sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah sampel penelitian mengingat begitu banyak responden yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kota Pekanbaru.
3. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
4. Agar memperluas ruang lingkup penelitian. Misalnya penelitian pada pemerintah provinsi dan

dilakukan pada SKPD yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

Bodnar, George H. dan William S. Hopwood. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi: Buku 1*. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta.

Choirunisah, Fariziah. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi. Tesis Maksi UGM, Yogyakarta.

Diani, Dian Irma. 2014. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman*. Skripsi, Universitas Negri Padang.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV Penerbit Undip.

Juwita, Rukmi. 2010. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Trikonomika, Volume 12, No. 2, Desember

2013, Hal. 201–214 ISSN 1411-514X.

Laudon, Kenneth C., and Jane Price Laudon. 2005. *Sistem Informasi Manajemen: Mengelola Perusahaan Digital*. Edisi 8. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Permana, Irvan. 2011. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Implikasinya Pada Akuntabilitas Survei Pada Dinas Kota Bandung*. Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Rajana HRP, Junita Putri. 2009. *Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar*. Skripsi.

Sumatera Utara: Universitas
Sumatera Utara.

Roesyanto, Indah A., 2007.
“Pengaruh Sumber Daya
Manusia dan Perangkat
Pendukungnya Terhadap
Keberhasilan Penerapan
Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 2005 di Pemerintahan
Kota Medan”, Skripsi, Jurusan
Akuntansi, USU, Medan.

Susilawati, Dwi Seftihani Riana.
2013. *Standar Akuntansi
Pemerintahan Dan Sistem
Pengendalian Internal
Sebagai Antecedent Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah. Jurnal
Akuntansi*,. ISSN : 1693-4482.

Tantriani Sukmaningrum. 2011.
*Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kualitas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah*

Undang-undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan
Negara.

Undang-undang No 15 tahun 2004
tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung
Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang 33 tahun 2004
tentang Perimbangan
Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan
Negara pasal 32 ayat (2).

Yuliani, Safrida., Nadirsyah dan
Usman Bakar. 2010.
*Pengaruh Pemahaman
Akuntansi, Pemanfaatan
Sistem Informasi Akuntansi
Keuangan Daerah Dan
Peran Internal Audit
Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah. Jurnal Telaah &
Riset Akuntansi Vol. 3. No.
2. Juli 2010 Hal. 206-220.*